

Nama : Okta Saputri  
NPM : 2213031011  
Mata Kuliah : Ekonomi Industri  
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., Dr. Nurdin, M.Si. dan Meyta Pritanddari,  
S.Pd., M.Pd.

## Tugas Pertemuan 12 Studi Kasus

### Analisis Konteks

#### a. Kelebihan dan Kekurangan Posisi Indonesia dalam GVC Saat Ini

Kelebihan utama Indonesia dalam *Global Value Chains (GVC)* adalah ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis dalam rantai pasok global untuk komoditas penting seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Indonesia menjadi pemasok utama bahan baku bagi industri global, khususnya energi terbarukan dan otomotif listrik. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Akibatnya, meskipun ekspor tinggi, kontribusi terhadap pendapatan nasional dan lapangan kerja masih terbatas. Indonesia berada pada tahap awal rantai nilai sebagai pemasok, bukan sebagai inovator atau produsen akhir.

#### b. Mengapa Indonesia Belum Mendapatkan Nilai Tambah Optimal dalam GVC

Penyebab utamanya adalah kurangnya kapasitas industri hilir dan ketergantungan pada teknologi asing. Selain itu, iklim investasi yang belum stabil, infrastruktur logistik yang mahal, dan kualitas SDM yang belum sejalan dengan kebutuhan industri canggih menghambat proses *upgrading*. Faktor lain adalah struktur ekspor yang tidak terdiversifikasi, di mana sebagian besar masih berbasis komoditas primer tanpa inovasi manufaktur atau teknologi tinggi.

### Evaluasi Kebijakan

#### a. Apakah Hilirisasi dan Larangan Ekspor Bijih Nikel Efektif?

Secara ekonomi, kebijakan hilirisasi berpotensi menaikkan posisi Indonesia dalam GVC karena mendorong pembangunan industri pengolahan lokal dan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) di dalam negeri. Contohnya, larangan ekspor bijih nikel memicu investasi besar dari Tiongkok dan Korea Selatan dalam pembangunan pabrik smelter dan baterai listrik. Namun, secara geopolitik, kebijakan ini menimbulkan ketegangan, terutama dengan Uni Eropa yang menilai kebijakan tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas WTO. Jadi, meski menguntungkan jangka panjang,

kebijakan ini menuntut diplomasi ekonomi yang cermat agar tidak berujung pada sanksi dagang.

b. Dampak terhadap Hubungan dengan Mitra Dagang

Kebijakan ini sempat menimbulkan friksi dengan Uni Eropa dan negara maju lainnya yang mengandalkan pasokan nikel dari Indonesia. Gugatan di WTO menunjukkan bahwa hilirisasi bisa dianggap proteksionis. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat daya tawar Indonesia di tingkat global, karena dunia membutuhkan nikel sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. Artinya, meski ada gesekan, posisi Indonesia menjadi lebih strategis dan diperhitungkan.

#### Sintesis dan Solusi (Strategi yang Diusulkan)

Jika saya menjadi penasihat ekonomi pemerintah, saya akan mengusulkan strategi “Hilirisasi Kolaboratif dan Diplomasi Ekonomi Adaptif”, yaitu:

1. Kemitraan Strategis Global: Mengundang investor asing dalam bentuk *joint venture* agar transfer teknologi berjalan, bukan hanya modal.
2. Diversifikasi Produk Hilir: Tidak hanya fokus pada nikel dan baterai, tetapi juga mengembangkan industri pendukung seperti kendaraan listrik, bahan kimia, dan logistik energi.
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Riset Lokal: Meningkatkan pendidikan vokasi dan riset agar Indonesia mampu menghasilkan inovasi dalam rantai nilai.
4. Pendekatan Diplomasi Ekonomi: Membangun komunikasi intensif dengan mitra dagang agar hilirisasi dipahami sebagai strategi pembangunan nasional, bukan proteksionisme.
5. Penyusunan Incentif yang Seimbang: Menyeimbangkan kepentingan investor dan pengusaha lokal melalui regulasi yang transparan dan konsisten.

Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat naik kelas dalam rantai nilai global dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, tanpa merusak hubungan ekonomi internasional.